

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar santri di Pesantren Turus setuju bahwa ilmu tentang politik atau *al-siyasah* khususnya politik Islam yang disertai wawasan atau pengetahuan umum sangat penting dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Dalam hal ini pesantren memberikan pendidikan terutama mengenai wawasan dan nilai-nilai budaya pesantren karena sangat diperlukan dalam berpolitik.
2. Pendidikan politik sebagai proses pewarisan nilai-nilai politik di pesantren merupakan upaya dalam membentuk santri yang memiliki karakter kuat dan benar-benar melek politik. Karakter sebagai *political participant* yang secara praktis dibina dalam keorganisasian yang mereka ikuti. Keaktifan mereka di organisasi OP3T secara informal telah memberikan mereka pembelajaran tentang materi-materi politik dan pengkaderisasian.
3. Dalam pendidikan politik, media sebagai sarana penyampaiannya sangatlah urgen. Di Pesantren Turus media massa dan media elektronik digunakan sebagai media pembelajaran politik karena dianggap media yang paling tepat dan efektif. Selain media tersebut biasanya kyai berceramah tentang pengalaman beliau di dunia perpolitikan. Memberikan wejangan-wejangan bagaimana dunia politik itu harus dijalani dan dihadapi sesuai budaya pesantren Turus.

4. Salah satu bentuk kegiatan politik para santri adalah bermusyawarah. Mereka senang bermusyawarah dan memberi usulan kepada pemimpin dalam kelompoknya. Misalnya saja diadakannya musyawarah besar dewan santri dalam rangka laporan pertanggungjawaban yang diadakan setiap akhir tahun. Lalu dipihnya kembali pengurus inti dewan santri sebagai regenerasi terutama pemilihan ketuanya yang mutlak ditentukan oleh para *kafilin* (santri senior).
5. Menurut pandangan sebagian besar santri, kyai sebagai figur atau tokoh yang sangat berpengaruh dan berperan di masyarakat, karena itu lebih tepat disebut atribut atau ciri budaya pesantren. Namun santri tidak selalu setuju apabila segala tindakan politiknya harus sesuai dengan keinginan kyai serta tidak setuju jika pesantren hanya dijadikan tempat kampanye oleh calon atau partai politik apalagi dijadikan *backup* untuk kepentingan politik tertentu.
6. Mengenai keterlibatan pesantren dalam mengarahkan orientasi dan tindakan politik santri, mereka setuju sehingga orientasi dan tindakan politiknya sesuai dengan budaya pesantren itu sendiri. Konsekuensinya pengetahuan politik serta lingkungan pesantren harus mendukung, sehingga tercipta *participant political culture* atau kultur politik partisipan dalam berpolitik.
7. Hubungan dan pembauran nilai budaya yang terjadi atau nilai-nilai budaya pesantren harus tetap dipertahankan, sehingga pesantren akan lebih netral dan mandiri serta berusaha memfilter nilai budaya lain yang tidak sesuai. Kondisi demikian akan menciptakan budaya politik yang baik dan bermanfaat karena memiliki *equilibrium* antara kepentingan dunia dan akhirat, terefleksi dalam

tindakan politik yang lebih mengutamakan kepentingan umat (kepentingan bersama) daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi pesantren sebagai konstitusi yang memiliki netralitas dari politik praktis harus tetap dijaga dan pertahankan, tetapi juga harus selalu peka terhadap dinamika politik yang terjadi. Oleh sebab itu pengembangan pendidikan berorientasi kesadaran politik santri harus lebih difasilitasi sehingga mencetak santri yang lebih egalitarian, rasional, independen, kritis, inklusif, kredibel, dan aktif dalam masyarakat, sehingga transformasi nilai-nilai budaya pesantren sebagai *grand design culture* untuk mewarnai kehidupan politik masyarakat akan terefleksi secara realistik (*waqi'iyah*) sesuai ajaran Islam yang *rahmatan li' alamin*.
2. Kyai sebagai pusat kendali (*central figure*) pesantren, harus tetap menjadi benteng aktif yang membina, mendidik, mengayomi, dan mengawal imat dalam proses implementasi nilai-nilai budaya yang memiliki identitas ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam dinamika dan atmosfer politik, sehingga potensi kepemimpinan para santrinya lebih terlatih dan terlealisasikan sesuai dengan orientasinya sesuai dengan orientasinya, minimal di lingkungannya.

3. Santri harus lebih termotivasi untuk belajar memupuk wawasan yang mendalam tentang politik, aktif berorganisasi agar ‘memangkas budaya minder’, sehingga memiliki orientasi yang lebih jelas dan dibuktikan dengan gerakan politik aktif, sehingga ketika berkiprah dalam kepemimpinan akan mampu menciptakan kultur yang *the right man on the right place*, baik kepemimpinan dalam masyarakat local maupun dalam skala yang lebih luas.
4. Pemerintah harus lebih proaktif dan serius dalam menjaga nilai-nilai kultur pesantren serta mengembangkan lebih dalam lagi pendidikan politik dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dianggap perlu karena pesantren memiliki kontribusi besar dalam peranan politik memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Adapun caranya dengan lebih meningkatkan harmonisasi hubungan dengan para ulama pesantren serta membuat produk hukum yang spesifikasi tentang pola pendidikan politik berbasis kultur pesantren dalam pengembangan pendidikan politik.
5. Partai politik, budayawan, pakar politik, dan akademisi yang beragama Islam harus lebih banyak mengkaji budaya politik khususnya budaya politik Islam (kultur pesantren), sehingga dapat memformulasikannya dalam kerangka kultur politik Indonesia.